



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 6 No 2 November 2024

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 113 - 122

KOMUNIKASI SEBAGAI PRAXIS: PENERAPAN TEORI HABERMAS DALAM GERAKAN SOSIAL MEDIA DIGITAL

Junus Kwelju¹, Rido Dominggus Latuheru²

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email : jkwelju2023@yahoo.com

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email : latuheru.rido@gmail.com

Abstract

This article explores the application of Jurgen Habermas' critical communication theory in the context of digital media social movements. Using literature study and observation methods, this research analyzes how the principles of communication as praxis can be applied in the use of social media by social movements, focusing on a case study of the Black Lives Matter movement. The results of the discussion show that this movement has utilized social media as a discursive space to build critical awareness, spread alternative narratives, and facilitate open and inclusive dialogue, in accordance with Habermas' concept of ideal communication. However, the application of Habermas' theory also faces challenges, such as polarization, the spread of misinformation, and limited access. This article concludes that by creating a virtual public space that is inclusive and free from domination, digital media social movements can promote democratic values and social justice. However, more reflective and inclusive communication strategies, as well as cooperation with social media platforms, are needed to overcome these challenges. In the long run, the application of Habermas' theory can help create a more democratic digital environment and encourage transformative social praxis.

Keywords : communication as praxis, Habermas' critical theory, digital media social movements, Black Lives Matter, virtual public space

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi penerapan teori komunikasi kritis Jurgen Habermas dalam konteks gerakan sosial media digital. Dengan menggunakan metode studi literatur dan observasi, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip komunikasi sebagai praksis dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial oleh gerakan sosial, dengan fokus pada studi kasus gerakan Black Lives Matter. Hasil diskusi menunjukkan bahwa gerakan ini telah memanfaatkan media sosial sebagai ruang diskursif untuk membangun kesadaran kritis, menyebarkan narasi alternatif, dan memfasilitasi dialog yang terbuka dan inklusif, sesuai dengan konsep komunikasi ideal Habermas. Namun penerapan teori Habermas juga menghadapi tantangan seperti polarisasi, penyebaran misinformasi, dan keterbatasan akses. Artikel ini menyimpulkan bahwa dengan menciptakan ruang publik virtual yang inklusif dan bebas dominasi, gerakan sosial media digital dapat mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Namun, strategi komunikasi yang lebih reflektif dan inklusif, serta kerja sama dengan platform media sosial, diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Dalam jangka panjang, penerapan teori Habermas dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih demokratis dan mendorong praksis sosial yang transformatif.

Kata Kunci: *Komunikasi Sebagai Praksis, Teori Kritis Habermas, Gerakan Sosial Media Digital, Black Lives Matter, Ruang Publik Virtual*

PENDAHULUAN

Dalam lanskap komunikasi kontemporer yang didominasi oleh media digital, media sosial telah menjadi sarana penting bagi gerakan sosial untuk menyuarakan aspirasi, memobilisasi dukungan, dan memperjuangkan perubahan sosial (Castells, 2012). Kemunculan media sosial telah membuka ruang baru bagi partisipasi politik dan aktivisme, di mana individu dan kelompok dapat terlibat dalam diskursus publik secara lebih terbuka dan inklusif. Namun, di balik potensi transformatifnya, media sosial juga menghadirkan tantangan baru dalam hal bagaimana komunikasi dibangun dan dimaknai dalam konteks gerakan sosial. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. (Tehubijuluw Zacharias & Laurens, 2023) Sumber daya manusia saat ini tidak menjamin bahwa kapasitas sumber daya ini tinggi, sehingga mengharuskan pejabat pemerintah untuk lebih jeli dalam melihat sumber daya manusia yang berkinerja seperti yang diharapkan. (Laurens, 2022) Sumber Daya Manusia masih menjadi sorotan bagi perusahaan untuk bertahan di era globalisasi. (Laurens, 2022)

Aspek keamanan data menjadi perhatian utama (Dharmawan Hadiutama & Laurens, 2024) Teori komunikasi kritis dari Jurgen Habermas menawarkan kerangka konseptual yang berharga untuk memahami dinamika komunikasi dalam gerakan sosial media digital. Habermas menekankan pentingnya komunikasi sebagai praxis, di mana tindakan komunikatif tidak hanya sekedar pertukaran informasi, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai pemahaman bersama dan mengkoordinasikan tindakan

kolektif (Habermas, 1984). Konsep ini menjadi relevan dalam konteks gerakan sosial media digital, di mana komunikasi menjadi sarana utama untuk membangun solidaritas, menyebarkan narasi alternatif, dan mempengaruhi opini publik. Proyek pengawasan kinerja adalah hasil kerja yang memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, dan memberikan kontribusi ekonomi. (Sarbun Tuankotta, Tehubijuluw , & Laurens, 2024) Studi tentang kinerja karyawan masih dilakukan oleh para peneliti hingga hari ini. (Laurens, 2023) Moral adalah keinginan dan ketulusan seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan disiplin untuk mencapai kinerja kerja yang maksimal. (Tehubijuluw Zacharias, Laurens, & Derek, 2024) Oleh sebab itu, organisasi bisnis harus memulai untuk memikirkan pentingnya pelayanan kepada pelanggan secara lebih matang melalui kualitas pelayanan. (Annisa Rahmah, Laurens, Madubun, & Selanno, 2024)

Tetapi pada kenyataannya (Derek Bakarbessy & Laurens , 2023) dalam pandangan Habermas, komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang terbebas dari distorsi dan dominasi, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskursus dan mencapai konsensus melalui argumentasi rasional (Habermas, 1996). Namun, dalam praktiknya, komunikasi dalam gerakan sosial seringkali dihadapkan pada tantangan seperti polarisasi, misinformasi, dan keterbatasan akses terhadap media sosial (Poell & van Dijck, 2018).

Para pemimpin institusi pemerintah, (Petronela Sahetapy & Laurens, 2023) Gerakan sosial menggunakan media sosial tidak hanya sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai ruang diskursif untuk membangun solidaritas, mengkoordinasikan tindakan kolektif, dan menantang narasi dominan (Gerbaudo, 2012). Melalui media sosial, gerakan sosial dapat memperluas jangkauan dan memperkuat konektivitas dengan para pendukung dan simpatisan. Namun, di sisi lain, media sosial juga berpotensi menciptakan gelembung *filter* (*filter bubble*) dan *echo chamber*, di mana individu hanya terpapar dengan informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, sehingga memperkuat polarisasi dan menyebarkan misinformasi (Flaxman et al., 2016). Lingkungan kerja adalah salah satu hal yang paling dekat dengan seseorang dalam pelaksanaan pekerjaannya. (Nur Samsiah Risahondua, Laurens, & Bahasoan, 2024)

Salah satu contoh konkret dari fenomena ini adalah gerakan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat, yang telah memanfaatkan media sosial secara efektif

untuk mengkampanyekan isu rasisme sistemik dan kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam. Melalui *platform* seperti *X* dan *Instagram*, aktivis gerakan ini dapat menyebarkan konten yang mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan, memberikan konteks sejarah, dan mengajak masyarakat untuk merefleksikan privileginya dalam struktur sosial (Freelon et al., 2016). Namun, di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tantangan seperti polarisasi, narasi kontra yang menyesatkan, dan keterbatasan akses bagi kelompok-kelompok marjinal.

Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang inilah (Laurens, Tahitu, & Sahanaya, 2024) penerapan teori komunikasi kritis Habermas dalam gerakan sosial media digital membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk menciptakan ruang diskursif yang lebih adil dan inklusif, di mana suara-suara marjinal dapat didengar dan diperhitungkan. Dengan memahami dinamika komunikasi dalam gerakan sosial media digital melalui lensa teori Habermas, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mengoptimalkan potensi media sosial sebagai sarana untuk membangun solidaritas, menyebarkan narasi alternatif, dan mempengaruhi perubahan sosial yang positif.

METODE

Metode Penelitian artikel ini, penulis menjelaskan dua pendekatan utama yang digunakan untuk menganalisis penerapan teori Habermas dalam gerakan sosial media digital, yaitu studi literatur dan observasi.

Studi literatur merupakan metode yang penting dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti (Snyder, 2019). Penulis mengkaji berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel media, untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang teori Habermas dan penerapannya dalam gerakan sosial media digital. Tinjauan literatur yang komprehensif memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, tema-tema penting, dan perdebatan-perdebatan utama dalam bidang ini (Baumeister & Leary, 1997). Dengan memahami landasan teoritis dan konseptual yang kuat, penulis dapat membangun argumen yang lebih solid dan meyakinkan tentang bagaimana teori Habermas dapat diterapkan dalam konteks gerakan sosial media digital.

Selain studi literatur, penulis juga melakukan observasi terhadap beberapa gerakan sosial media digital untuk melihat bagaimana teori Habermas dapat

diterapkan dalam praktik. Observasi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Kawulich, 2005). Penulis mengamati bagaimana gerakan sosial media digital menggunakan platform seperti X, Facebook, dan Instagram untuk mengorganisir diri, menyebarkan informasi, dan memobilisasi dukungan. Melalui observasi, penulis dapat memperoleh wawasan tentang dinamika komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam gerakan sosial media digital, serta mengidentifikasi contoh-contoh konkret penerapan teori Habermas dalam praktik. Observasi juga memungkinkan penulis untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip komunikasi Habermasian, seperti inklusivitas, transparansi, dan saling menghormati, diterapkan dalam konteks yang sebenarnya.

Kombinasi antara studi literatur dan observasi memberikan penulis pemahaman yang lebih lengkap dan nuansa tentang penerapan teori Habermas dalam gerakan sosial media digital. Studi literatur memberikan landasan teoritis dan konseptual yang kuat, sementara observasi memberikan bukti empiris tentang bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan menggunakan kedua metode ini, penulis dapat menghasilkan analisis yang lebih kaya dan lebih bermakna tentang potensi dan tantangan penerapan teori Habermas dalam gerakan sosial media digital. Penulis dapat mengeksplorasi bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai ruang publik yang inklusif dan demokratis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat atau memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip komunikasi Habermasian dalam konteks digital. Secara keseluruhan, penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik tentang penerapan teori Habermas dalam gerakan sosial media digital. Dengan memahami landasan teoritis dan bukti empiris yang relevan, penulis dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi diskusi tentang peran media sosial dalam praxis sosial dan transformasi demokratis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dari studi kasus menunjukkan bahwa gerakan *Black Lives Matter* telah menerapkan prinsip-prinsip komunikasi sebagai praxis dalam strategi media sosial mereka. Media sosial digunakan sebagai ruang diskursif untuk membangun kesadaran kritis, menyebarkan narasi alternatif, dan memfasilitasi dialog yang terbuka dan inklusif.

Aktivis gerakan memanfaatkan media sosial untuk membagikan pengalaman dan perspektif mereka tentang rasisme sistemik, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama di antara para pendukung gerakan. Mereka menggunakan platform seperti X dan Instagram untuk menyebarkan konten yang mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan polisi, memberikan konteks sejarah tentang rasisme di Amerika Serikat, dan mengajak masyarakat untuk merefleksikan privileginya dalam struktur sosial yang ada. Dengan cara ini, gerakan berusaha untuk membangun kesadaran kritis dan mencapai konsensus di antara para pendukungnya melalui dialog dan pertukaran argumen yang rasional, sesuai dengan prinsip komunikasi ideal yang diajukan oleh Habermas.

Aktivis juga memanfaatkan media sosial untuk mengkoordinasikan aksi-aksi offline, seperti demonstrasi dan protes. Melalui unggahan dan pesan di media sosial, mereka dapat mengomunikasikan lokasi, waktu, dan taktik aksi dengan cepat dan efisien. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk memobilisasi dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk selebriti, politisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, media sosial menjadi sarana untuk mengkoordinasikan tindakan kolektif dan memperluas jangkauan gerakan, memfasilitasi proses negosiasi makna dan pencapaian pemahaman bersama yang menjadi inti dari konsep komunikasi sebagai praxis menurut Habermas.

Salah satu contoh penerapan komunikasi sebagai praxis dalam gerakan *Black Lives Matter* adalah kampanye *#SayHerName*, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan kulit hitam. Kampanye ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi personal dan statistik tentang korban-korban kekerasan rasial dan gender, serta membangun solidaritas di antara para pendukung gerakan (Cision, 2020). Melalui kampanye ini, gerakan berusaha untuk mencapai pemahaman bersama dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam diskursus kritis tentang isu-isu interseksionalitas, sekaligus menantang narasi dominan yang seringkali mengabaikan pengalaman perempuan kulit hitam.

Namun, penerapan teori Habermas dalam gerakan sosial media digital juga menghadapi tantangan tersendiri. Dinamika komunikasi daring seringkali rentan terhadap polarisasi, di mana diskusi dapat terpecah menjadi kubu-kubu yang saling berseberangan dan sulit mencapai konsensus. Hal ini bertentangan dengan prinsip komunikasi ideal yang diajukan oleh Habermas, di mana semua pihak seharusnya

memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskursus dan mencapai konsensus melalui argumentasi rasional.

Selain itu, penyebaran misinformasi dan disinformasi melalui media sosial juga menjadi masalah yang harus dihadapi oleh gerakan, karena dapat mengaburkan narasi dan memecah belah solidaritas. Fenomena ini juga mengancam validitas klaim kebenaran yang menjadi salah satu prasyarat komunikasi ideal menurut Habermas, di mana pernyataan yang disampaikan harus sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap media sosial. Meskipun media sosial dianggap sebagai ruang publik digital yang terbuka, namun pada kenyataannya akses terhadap platform ini tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Kelompok-kelompok marjinal seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses dan berpartisipasi di media sosial, sehingga suara mereka dapat termarginalkan dalam diskursus gerakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam komunikasi ideal yang diajukan oleh Habermas, di mana semua pihak seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam diskursus.

KESIMPULAN

Teori komunikasi yang dikembangkan oleh filsuf Jerman Jürgen Habermas menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk memahami bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk praxis sosial. Habermas berpendapat bahwa komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang bebas dari dominasi dan manipulasi, di mana semua partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengar. Dalam konteks gerakan sosial media digital, hal ini berarti bahwa platform seperti X, *Facebook*, dan Instagram harus digunakan sebagai ruang publik yang inklusif dan demokratis, di mana semua orang dapat berpartisipasi secara setara dalam diskusi dan pengambilan keputusan.

Dengan menciptakan ruang publik virtual yang inklusif dan bebas dari dominasi, gerakan sosial media digital dapat membantu mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Media sosial memungkinkan individu dan kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan pendapat dan pengalaman mereka, serta membangun solidaritas dan dukungan dari komunitas yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dalam gerakan-gerakan seperti *#BlackLivesMatter* di Amerika Serikat atau *#MeToo* di seluruh dunia, di mana media sosial digunakan untuk

mengangkat isu-isu ketidakadilan sosial dan menuntut perubahan sistemik. Dalam gerakan-gerakan ini, media sosial berperan sebagai alat yang kuat untuk memobilisasi dukungan, menyebarkan informasi, dan mengorganisir tindakan kolektif.

Namun, penerapan teori Habermas dalam praktik gerakan sosial media digital juga menghadapi tantangan-tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan media sosial untuk menciptakan ruang gema (*echo chamber*) dan polarisasi politik. Algoritma media sosial sering kali menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan pandangan politik pengguna, sehingga menciptakan lingkungan di mana orang-orang hanya terpapar pada perspektif yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini dapat memperkuat prasangka, mempertajam perbedaan, dan mempersulit dialog antara kelompok yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, potensi media sosial untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan demokratis dapat terhambat, karena orang-orang menjadi semakin terpolarisasi dan tidak bersedia untuk mendengarkan atau mempertimbangkan pandangan yang berbeda.

Tantangan lain yang dihadapi oleh gerakan sosial media digital adalah penyebaran informasi yang salah dan manipulasi oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Media sosial rentan terhadap penyebaran berita palsu, teori konspirasi, dan propaganda yang dapat merusak integritas ruang publik virtual. Informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan media sosial, sering kali tanpa pemeriksaan fakta atau kritik yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan perpecahan di antara pengguna media sosial, serta melemahkan kemampuan gerakan sosial untuk memobilisasi dukungan dan mencapai tujuan mereka. Dalam beberapa kasus, manipulasi informasi di media sosial bahkan dapat digunakan untuk menghasut kekerasan atau konflik, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip komunikasi Habermasian.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, gerakan sosial media digital perlu menerapkan strategi komunikasi yang lebih reflektif dan inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip etika diskursus yang diajukan oleh Habermas, seperti kejujuran, transparansi, dan saling menghormati (Habermas, 1990). Gerakan sosial harus berusaha untuk menciptakan ruang publik virtual yang terbuka untuk berbagai perspektif dan pengalaman, serta mendorong dialog yang konstruktif di antara kelompok yang berbeda. Mereka harus secara aktif

melibatkan dan mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan, serta berupaya untuk membangun konsensus dan saling pengertian di tengah perbedaan.

Selain itu, gerakan sosial juga harus bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengembangkan kebijakan dan algoritma yang lebih adil dan transparan. Hal ini dapat mencakup upaya untuk mempromosikan keragaman informasi, mengurangi penyebaran konten yang berbahaya atau menyesatkan, dan memberikan pengguna lebih banyak kontrol atas data dan pengalaman mereka di media sosial. Gerakan sosial juga harus melakukan upaya untuk memerangi penyebaran informasi yang salah dan manipulasi, termasuk dengan mempromosikan literasi media dan berpikir kritis di antara pengguna media sosial.

Dalam jangka panjang, penerapan teori Habermas dalam gerakan sosial media digital dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih demokratis dan inklusif. Dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk praxis sosial yang reflektif dan transformatif, gerakan sosial dapat membantu mempromosikan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan emansipasi dalam masyarakat. Media sosial dapat menjadi ruang di mana warga negara dapat terlibat dalam deliberasi publik yang bermakna, membangun pemahaman bersama, dan mengembangkan solusi kolektif untuk masalah-masalah sosial yang mendesak.

Namun, untuk mewujudkan potensi ini, gerakan sosial perlu terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks dan dinamis dalam lanskap media sosial yang terus berubah. Mereka harus tetap waspada terhadap bahaya polarisasi, manipulasi, dan eksklusif, serta bekerja tanpa lelah untuk membangun ruang publik virtual yang lebih inklusif, deliberatif, dan demokratis. Hanya dengan upaya yang terkoordinasi dan reflektif dari gerakan sosial, platform media sosial, dan masyarakat sipil secara lebih luas, kita dapat memanfaatkan kekuatan media sosial untuk memajukan praxis sosial yang transformatif dan mencapai perubahan.

REFERENSI

- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311-320.
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge, UK: Polity Press.

- Cision (2020). The Power of #SayHerName: How Black Lives Matter Used Social Media to Demand Justice for Black Women. <https://www.cision.com/blog/the-power-of-sayhername-how-black-lives-matter-used-social-media-to-demand-justice-for-black-women>
- Cukier, W., Bauer, R., & Middleton, C. (2009). Applying Habermasian theory to Internet-based communication. In P. M. Jenlink & B. Haynes (Eds.), *Theory and resistance in education: Towards a pedagogy for the opposition* (pp. 347-365). Rowman & Littlefield.
- Dahlberg, L. (2018). Towards a theory of alternative and community media: Understanding the alternative media ecology. In L. Dahlberg & K. Esperança (Eds.), *Alternative media and transformative social movements* (pp. 11-36). Palgrave Macmillan.
- Flaxman, S., Goel, S., & Rao, J. M. (2016). Filter bubbles, echo chambers, and online news consumption. *Public Opinion Quarterly*, 80(S1), 298-320.
- Freelon, D., McIlwain, C. D., & Clark, M. (2016). Beyond the Hashtag: #Ferguson, #BlackLivesMatter, and the Online Struggle for Offline Justice. Center for Media & Social Impact, American University.
- Gerbaudo, P. (2012). *Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism*. London: Pluto Press.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Kawulich, B. B. (2005). Participant observation as a data collection method. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*, 6(2), Art. 43.
- Poell, T., & van Dijck, J. (2018). Social Media and the Transformation of Activism. *Media and Communication*, 6(4), 1-5.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Tehubijuluw Zacharias, S. L., & Laurens, S. (2023). Transformational Leadership on Performance with Locus of Control as Moderating. *Action Research Literate*, 1-8.
- Laurens, S. (2022). THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE, MOTIVATION AND SATISFACTION THROUGH COMMITMENT TO EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE

EDUCATION AND CULTURE DEPARTMENT OF MALUKU PROVINCE. *Jurnal Badati*, 40-48.

Laurens, S. (2022). INFLUENCE OF LEADERSHIP, REWARD AND PUNISHMENT ON MILLENNIAL EMPLOYEE PERFORMANCE. *Jurnal Badati*, 54-67.

Sarbun Tuankotta, T. Z., Tehubijuluw , Z., & Laurens, S. (2024). Analysis of Project Supervision Performance in the Water Resources Sector of the Public Works and Spatial Planning Service of Central Maluku Regency . *Jurnal Social Science*, 1085-1098.

Laurens, S. (2023). INTELLIGENCE DIMENSIONS ON EMPLOYEE PERFORMANCE . *Jurnal Badati*, 16-27.

Derek Bakarbessy, S. L., & Laurens , S. (2023). MODEL OF EMPOWERMENT OF TANIMBAR WHIEAVING CRAFTSMAN IN THE CITY OF AMBON. *Jurnal Badati*, 56-70.

Tehubijuluw Zacharias, S. L., Laurens, S., & Derek, B. (2024). ORGANIZATIONAL CULTURE, POSITION PROMOTION AND ENVIRONMENT TO WORK SPIRIT. *Jurnal Badati*, 44-52.

Laurens, S., Tahitu, A., & Sahanaya, C. (2024). PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Badati*, 90-109.

Dharmawan Hadiutama, S. L., & Laurens, S. (2024). Evaluasi Implementasi Artificial Intelligence dalam Sistem Pengaduan Masyarakat: Analisis Efisiensi dan Kepuasan Pengguna. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 14334-14341.

Nur Samsiah Risahondua, S. L., Laurens, S., & Bahasoan. (2024). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik Terhadap Kinerja Pegawai. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 7054-4246.

Petronela Sahetapy, S. L., & Laurens, S. (2023). The Effectiveness of Leadership Based on Pela Gandong Values in the Population and Civil Registration Office of Ambon City. *RichtMann Publishing*, 105-120.

Annisa Rahmah, S. L., Laurens, S., Madubun, & Selanno. (2024). Tingkat Kepuasan Pasien BPJS Terhadap Kualitas Layanan Kesehatan Di Puskemas Mako Pulau Buru . *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 779-792.